

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu hal yang diamanatkan pada Pembukaan UUD 1945, yaitu pada alinea ke-4. Istilah “mencerdaskan kehidupan bangsa” menyiratkan bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan yang mampu mencerdaskan segenap rakyat Indonesia. Hal ini diperkuat dengan UUD 1945, pasal 31, yaitu:

1. *Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*
2. *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*
3. *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.*
4. *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*
5. *Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*

Pendidikan adalah sebuah program yang mengandung komponen visi dan misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, guru murid, sarana dan prasarana, biaya, manajemen pengelolaan, akademis atmosfer, kelembagaan, lingkungan, kerja sama, sistem informasi, dan evaluasi. Sebagai sebuah sistem, seluruh komponen pendidikan tersebut memiliki hubungan fungsional antara satu dan lainnya dengan titik tekan pada tercapainya visi dan misi dan tujuan. Kelemahan pada salah satu komponen tersebut (terutama SDM dan dana) akan

sangat berpengaruh pada komponen pendidikan lainnya. Demikian pula sebaliknya (Nata, Abudin, 2003: 64).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pesertadidik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya masyarakat, bangsa dan Negara.

Pendidikan pada umumnya di tujukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tertentu sebagaimana yang sudah di terapkan oleh filsafat pendidikan, yakni nilai atau norma yang di junjung tinggi oleh suatu lembaga pendidikan (Moch. Roqib, 2009: 17).

Pendidikan merupakan proses humansasi melalui pengangkatan manusia ke taraf insani. Artinya pendidikan adalah usaha membawa manusia keluar dari kebodohan, dengan membuka tabir *actual-transenden* dari sifat alami manusia *humanness*. Proses belajar juga menuntut upaya memahami bagaimana individu berada dengan dengan yang lain *individual differences*. Disisi lain memahami bagaimana menjadi manusia seperti manusia yang lain persamaan dalam *spesieshood or humananes* proses pendidikan seharusnya memberikan tempat *insideout* peberdayaan diri berdasarkan paradigma karakter, dan motif sendiri. Dengan *self awareness* dan *self insight*, peserta didik dapat terhubung dengan

dirinya dan mempunyai pemahaman yang lebih tentang dirinya (Prabowo, Agus, 2009: 12).

Dalam Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5, disebutkan bahwa: “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Persamaan hak ini meliputi semua suku, agama, ras, jenis kelamin dan sebagainya, termasuk warga negara dengan kebutuhan khusus, atau yang disebut dengan penyandang kelainan atau ketunaan.

Amanat hak atas pendidikan bagi penyandang kelainan atau ketunaan ditetapkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 disebutkan bahwa: “pendidikan khusus (pendidikan luar biasa) merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial”. Ketetapan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tersebut bagi anak penyandang kelainan sangat berarti karena memberi landasan yang kuat bahwa anak berkelainan memperoleh kesempatan yang sama sebagaimana yang diberikan kepada anak normal lainnya dalam hal pendidikan dan pengajaran (Efendi, Mohammad, 2006: 1).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, disebutkan bahwa:

“Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.

Yang termasuk kedalam anak berkebutuhan khusus (ABK) ini menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (2010), dapat dikelompokkan menjadi: 1) tunanetra atau anak yang mengalami gangguan penglihatan, 2) tunarungu atau anak yang mengalami gangguan pendengaran, 3) tunadaksa atau anak yang mengalami kelainan tubuh atau gerak, anak berbakat atau anak yang memiliki kecerdasan dan kemampuan luar biasa, 4) tuna grahita, anak lamban belajar, anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik (disleksia), anak mengalami gangguan komunikasi, 5) tunalaras anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku, anak yang termarginalkan. Karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki, anak berkebutuhan khusus memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka.

Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Oleh karena hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara (Mudjito, Harizal dan Elifindri, 2012: 27). Anak tunarungu sebagai makhluk sosial seperti juga manusia yang lain memiliki kebutuhan untuk melakukan interaksi sosial.

Penderita tunarungu tersebar di berbagai daerah. Hampir di setiap desa terdapat penderita tunarungu, termasuk di desa peneliti bermukim, yaitu desa Mernek Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap. Melalui penelitian ini, peneliti ingin membantu anak berkebutuhan khusus, utamanya penderita tunarungu yang tinggal di sekitar lingkungan rumah peneliti.

adanya bimbingan dan pengawasan bagi anak-anak tersebut, baik dari orang tua maupun dari pembimbing pada khususnya.

Bimbingan tersebut merupakan program dan layanan pendidikan yang diarahkan untuk membantu individu agar mereka dapat menyusun dan melaksanakan rencana serta melakukan penyesuaian diri dalam semua aspek kehidupannya sehari-hari (Fenti Hikmawanti, 2011: 1). Salah satunya dengan bimbingan dan pengarahan yang dilakukan di sekolah. Bimbingan tersebut meliputi pemberian informasi secara lisan atau tertulis, bimbingan kelompok yang mendorong peserta didik untuk saling menyesuaikan diri dan menyalurkan bakat yang dimiliki serta melakukan bimbingan individu seperti konseling dan psikoterapi individu (Fenti Hikmawanti, 2011: 195-196).

Pemberian bimbingan disesuaikan dengan kondisi dan gangguan yang dialami masing-masing anak seperti halnya pada anak tunarungu. Banyak anggapan bahwa anak berkelainan pendengaran atau anak tunarungu dianggap suatu kelainan yang paling ringan, sebab gangguannya hanya terjadi pada aspek pendengaran. Namun tetap saja prinsip “kehilangan” pada salah satu potensi alat indranya akan berakibat pada pengembangan potensi yang lain. Apa pun kondisi penderita tunarungu tetap tidak luput dari problem yang menyertainya terutama yang berkaitan dengan masalah kemampuan fisiknya yang lain, kejiwaan dan penyesuaian sosial dengan lingkungannya (Mohammad Efendi, 2006: 73).

Anak tunarungu mengalami gangguan pada pendengarannya. Akibat dari kelainannya tersebut, perkembangan bahasanya menjadi terhambat, sehingga

mereka kurang mampu bersosialisasi dengan masyarakat normal pada umumnya.

Haenudin (2013: 67) menyatakan bahwa:

“Anak Tunarungu dalam segi bicara dan bahasa mengalami hambatan, hal ini disebabkan adanya hubungan yang erat antara bahasa dan bicara dengan ketajaman pendengaran, mengingat bahasa dan bicara merupakan hasil proses peniruan sehingga para tunarungu dalam segi bahasa memiliki ciri yang khas, yaitu sangat terbatas dalam pemilihan kosa kata, sulit mengartikan arti kiasan dan kata-kata yang bersifat abstrak.”

Gangguan pendengaran anak tunarungu akan membawa dampak pada perkembangan berbahasanya yang mempengaruhi kemampuan berkomunikasi anak tunarungu. Keterbatasan anak tunarungu dalam menerima informasi bersifat auditif menyebabkan perkembangan kognitif menjadi terhambat. Hambatan yang dialami anak tunarungu berakibat pada turunnya prestasi akademik yang mengakibatkan hasil belajar cenderung rendah (Agnes Fitri Anjarsari dan Yulianti, 2017: 2).

Gangguan pendengaran sering berdampak pada kemampuan verbal seseorang sehingga mereka menggunakan bahasa isyarat dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi. Pada umumnya anak tunarungu mempelajari bahasa isyarat di Sekolah Luar Biasa (SLB). Di Indonesia ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan. Pertama, Sistem Bahasa Isyarat Indonesia atau SIBI. Kedua, Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Dalam perkembangannya Bisindo tidak dapat digunakan dalam komunikasi sehari-hari penyandang tunarungu karena penerapan kosakata yang tidak sesuai dengan aspirasi dan nurani kaum tunarungu, terlebih penerapan bahasa yang terlalu baku dengan tata bahasa kalimat bahasa Indonesia yang membuat kaum tunarungu kesulitan berkomunikasi. SIBI merupakan bahasa

ibu dan bahasa isyarat alami budaya asli Indonesia yang dengan mudah dapat digunakan dalam pergaulan isyarat kaum tunarungu sehari-hari (Ari Riadi dan Putra Aditia, 2017: 799).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian mengenai pengaruh penggunaan bahasa isyarat berbantuan kartu bergambar dan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran penguasaan kosakata pada siswa kelas II Tunarungu SLB Negeri Cilacap tahun pelajaran 2019/2020.

B. Fokus Penelitian

Agar dalam pembahasan penelitian memperoleh hasil yang mendalam, terarah, dan sistematis, maka peneliti memfokuskan pada implementasi penggunaan bahasa isyarat berbantuan kartu bergambar dan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran penguasaan kosakata pada siswa kelas II tunarungu SLB Negeri Cilacap.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan, yaitu :

1. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan penggunaan bahasa isyarat berbantuan kartu bergambar terhadap penguasaan kosakata pada kelas II Tunarungu SLB Negeri Cilacap?
2. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan aktivitas belajar siswa terhadap penguasaan kosakata pada kelas II Tunarungu SLB Negeri Cilacap?

3. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan penggunaan bahasa isyarat berbantuan kartu bergambar dan aktivitas belajar siswa terhadap penguasaan kosakata pada kelas II Tunarungu SLB Negeri Cilacap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Ada tidaknya pengaruh yang positif dan signifikan penggunaan bahasa isyarat berbantuan kartu bergambar terhadap penguasaan kosakata pada kelas II Tunarungu SLB Negeri Cilacap.
2. Ada tidaknya pengaruh yang positif dan signifikan aktivitas belajar siswa terhadap penguasaan kosakata pada kelas II Tunarungu SLB Negeri Cilacap?.
3. Ada tidaknya pengaruh yang positif dan signifikan penggunaan bahasa isyarat berbantuan kartu bergambar dan aktivitas belajar siswa terhadap penguasaan kosakata pada kelas II Tunarungu SLB Negeri Cilacap.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teori mengenai tingkat pemahaman tentang penggunaan bahasa isyarat berbantuan media kartu bergambar dan penguasaan kosakata pada siswa tunarungu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama kuliah mengenai evaluasi pendidikan yang terkait dengan penggunaan bahasa isyarat dan penguasaan kosakata pada siswa tunarungu.

b. Bagi Guru

Mengukur sejauh mana kompetensi yang dimiliki guru terkait dengan implementasi penggunaan bahasa isyarat dalam meningkatkan penguasaan kosakata pada siswa tunarungu.

c. Bagi Pemerintah

Membantu pemerintah dalam menilai kualitas guru di sekolah luar biasa dalam memberikan pelayanan pembelajaran bagi siswa, khususnya siswa penderita tunarungu.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah penafsiran dalam penelitian ini, maka perlu diberikan batasan pengertian dan penegasan istilah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan makna yang jelas, tegas, dan memperoleh kesatuan penelitian dalam memahami judul penelitian.

1. Bahasa Isyarat

Bahasa isyarat adalah bahasa yang dipergunakan dengan menggunakan gerakan-gerakan badan dan mimik muka khususnya pada tunarungu. Bahasa

Isyarat yang banyak digunakan di Indonesia ada 2 macam yaitu SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia) dan BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia).

2. Kartu Bergambar

Kartu bergambar adalah sebuah lembaran kertas yang berisi gambar bentuk isyarat tangan atau anggota tubuh lain yang diberikan dalam pembelajaran penguasaan kosakata bagi siswa penderita tunarungu.

3. Pembelajaran

Pembelajaran adalah “proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkontruksikan pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran.

4. Kosakata

Kosakata adalah himpunan kata yang dimiliki oleh seseorang atau entitas lain, atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kekayaan kosakata seseorang secara umum dianggap merupakan gambaran dari intelejensia atau tingkat pendidikannya.